



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## SWASEMBADA BERAS DAN TANTANGANNYA

**Teddy Prasetiawan**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
*teddy@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan atas inovasi teknologi padi dari International Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai berhasil mengatasi ketahanan pangan nasional di tengah pandemi dan krisis pangan yang melanda dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia selama 3 tahun berturut-turut sejak 2019 mengalami surplus beras dengan tingkat produksi pada kisaran 31,31 hingga 31,5 juta ton per tahun. Jumlah ini telah melebihi total konsumsi dalam negeri yang hanya 30,03 juta ton. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya pemerintah yang sejak 2015 lalu masif membangun infrastruktur pertanian, yang meliputi 29 bendungan, 4.500 embung, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi hingga tahun 2022. Disamping itu, penguatan lain dalam hal inovasi menciptakan varietas padi unggul turut berpengaruh dalam pencapaian ini.

Berbagai kalangan telah menyampaikan apresiasinya terhadap hal ini, termasuk Komisi IV DPR RI. Program swasembada beras sebenarnya adalah program lama, bahkan telah digaungkan sejak era Orde Lama. Pada era Orde Baru tahun 1984 Indonesia akhirnya mencapai swasembada beras hingga mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB), tetapi dua tahun berselang terjadi ledakan hama yang menekan produksi beras nasional, diikuti dengan permasalahan keterbatasan anggaran akibat merosotnya penerimaan negara dari sektor migas, dan kekeringan panjang menjadikan Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras hingga tahun 2019.

Swasembada beras era Presiden Soeharto juga merupakan buah dari pembangunan infrastruktur pertanian, baik bendungan, embung, atau jaringan irigasi, serta berkat intensifikasi dan perluasan lahan. Namun, itu dicapai dengan upaya panjang dan pembiayaan besar. Penekanan pada kuantitas juga mengakibatkan rendahnya kualitas beras sehingga pada akhirnya beras nasional sulit bersaing dengan beras impor yang berbiaya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik.

Belajar dari kesalahan yang terjadi dalam hal memelihara kesinambungan swasembada beras era Presiden Soeharto, pemerintah saat ini hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain: *pertama*, jaminan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 2009. Dengan tingkat penurunan luas lahan sawah yang terjadi saat ini, maka diprediksi pada 2045 luas lahan sawah di seluruh Indonesia hanya tinggal 3,4 juta hektar. Luas ini tentu saja mustahil memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Dalam kurun waktu 7 tahun saja (2012-2019) terjadi penurunan 1 juta hektar luas lahan sawah, yaitu dari 8,4 juta hektar menjadi 7,4 juta hektar. *Kedua*, menekan biaya produksi bahan pangan yang disebabkan oleh mekanisme produksi dan sistem distribusi yang kurang efisien di Indonesia. Memang harus diakui bahwa produksi pangan dalam negeri tidak hanya sebagai penghasil pangan, tetapi juga menghasilkan *non-food services* seperti penggerak ekonomi desa, memperbaiki lingkungan hidup, dan mengerem laju urbanisasi. Tingginya ongkos produksi dapat diatasi melalui investasi pertanian yang berkelanjutan yang dapat mendorong modernisasi dan transfer teknologi.

*Ketiga*, kesejahteraan petani yang belum mendapatkan prioritas. Pemerintah Orde Baru secara sistematis telah menekan harga beras dan merangsang petani untuk memproduksi beras lebih banyak lagi. Petani tradisional yang kurang adaptif terhadap inovasi cenderung tenggelam dalam sistem tersebut. Kondisi saat ini sebenarnya belum jauh berbeda. Nilai tukar petani (NTP) petani tanaman pangan merupakan yang terendah. Data BPS menyebutkan bahwa pada 2021 lalu hanya pada bulan Januari saja NTP berada di atas 100. Pada tahun 2022 pun kondisinya belum membaik, bahkan berada pada titik terendah 95,28 pada bulan Juli. NTP di bawah 100 berarti indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan harga yang dibayarkan.

Mempertahankan swasembada nyatanya lebih berat ketimbang meraihnya, terlebih di tengah dunia yang menghadapi tantangan perubahan iklim, pandemi Covid-19, dan konflik geopolitik. Namun, pencapaian saat ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mencapai target yang lebih besar. Komisi IV DPR RI mengingatkan pemerintah agar swasembada beras yang telah dicapai diperluas menjadi swasembada pangan jenis lain, seperti sorgum, jagung, hingga umbi-umbian yang menjadi andalan lokal sejumlah daerah di Indonesia dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

## Atensi DPR

Komisi IV DPR RI telah mengapresiasi prestasi Pemerintah Indonesia yang memperoleh penghargaan dari IRRI beberapa waktu yang lalu dan mendorong pemerintah untuk tetap fokus membangun ketahanan pangan Indonesia menghadapi krisis pangan global. Momentum ini perlu dimaknai agar swasembada beras yang telah dicapai diperluas menjadi swasembada pangan jenis lain, seperti sorgum, jagung, hingga umbi-umbian.

Komisi IV DPR RI perlu memantau implementasi UU No. 41 Tahun 2009 dalam rangka menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di tengah ancaman alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, Komisi IV DPR RI perlu terus memantau kinerja pemerintah dalam hal menekan biaya produksi bahan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dalam rangka menjamin keberlangsungan swasembada beras dan pangan di Indonesia.

## Sumber

dpr.go.id, 16 Agustus 2022;

katadata.co.id, 16 Agustus 2022;

Kompas, 15 Agustus 2022;

Media Indonesia, 15 Agustus 2022;

pertanian.sariagri.id, 8 Agustus 2022; dan

Pidato Presiden Joko Widodo dalam acara Penerimaan Penghargaan IRRI, 14 Agustus 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Juli Panglima S  
Sri Nurhayati Q  
Venti Eka Satya  
Monika Suhayati  
Rafika Sari

### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022